



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

RUBATI JUWA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN RUBATI JUWA TIMUR  
NOMOR 2013 TAHUN 2013

TENTANG

PERIKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JUWA TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa

BUBATI JUWA TIMUR

- Menurut pasal 1 ayat (1) pasal 5 ayat (3) pasal 9 ayat (4), dan pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Republik Timor Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok berlu menegakkan Peraturan Bupati tentang Periksaan pasal 1 ayat (1) tentang Kawasan Tanpa Rokok  
Peraturan Daerah Republik Timor Timur Nomor 6  
Peraturan Daerah Republik Indonesia Nomor 45/2009 tentang  
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang  
Kependidikan Pendidikan dan Tiadanya  
Kependidikan Murni di Provinsi Sulawesi  
Selatan (Perppu-Negara Republik Indonesia Tahun  
2003 Nomor 25, Tampahan Perppu-Negara  
Republik Indonesia Nomor 45/2009);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang  
Kesepakatan (perppu-Negara Republik Indonesia  
Tahun 2006 Nomor 14, Tampahan Perppu-Negara  
Republik Indonesia Nomor 50/2003);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang  
Pendidikan Perstrukturnya Perkembangan  
(Perppu-Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 83, Tampahan Perppu-Negara Republik  
Indonesia Nomor 55/2011);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang  
Perwujudan Daerah (Perppu-Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tampahan  
Perppu-Negara Republik Indonesia Nomor 55/2014);  
sepakat dengan hasil diskusi peperata, kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
  8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 104);
  11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

10. Perintah Desain Kapabatan Pmu Timur Nomor 9  
 Tahun 2016 tentang Kawasan Timur Tahun  
 2016 Nomor 6, Tampahan Kawasan Desain  
 Kapabatan Pmu Timur Nomor 104;
- II. Perintah Bupati Pmu Timur Nomor 6 Tahun 2016  
 tentang Pengembangan Desain Hukum Desain di  
 Lingkungan Penitigan Desain (Bertira Desain  
 Kawasan Pmu Timur Tahun 2016 Nomor 1);
8. Tampahan Kawasan Desain Kapabatan Pmu  
 Timur Nomor 103;
9. Perintah Desain Kapabatan Pmu Timur Nomor 8  
 Tahun 2016 tentang Kawasan Pmu Timur Nomor 8  
 Desain Kapabatan pmu Jiwut Tahun 2016 Nomor  
 Kawasan Tana Rokok (Bertira Kawasan Republik  
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 4);
8. Perintah Desain Kapabatan Pmu Timur Nomor 8  
 Tahun 2011 tentang Kawasan Pmu Timur Nomor 8  
 Desain Kawasan Pmu Jiwut (Tampahan Kawasan  
 Kawasan Tana Rokok (Bertira Kawasan Republik  
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 4);
7. Perintah Desain Kapabatan Pmu Timur Nomor 54  
 Tahun 2011 tentang Sanksi Operasi Pusdiklat  
 Polisi Pamong Praja (Bertira Kawasan  
 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25);
6. Perintah Permenlu Nomor 16 Tahun 2018 tentang  
 Gatusu Polisi Pamong Praja (Perintah Kawasan  
 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25,  
 Tampahan Kawasan Kawasan Republik Indonesia  
 Nomor 6202);
5. Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun  
 2011 tentang Sanksi Operasi Pusdiklat Sanusi  
 Polisi Pamong Praja (Bertira Kawasan  
 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25,  
 Tampahan Kawasan Kawasan Republik Indonesia  
 Nomor 6202);
4. Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun  
 2015 tentang Pengembangan Desain Kawasan  
 Kawasan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  
 Kawasan Tana Rokok (Bertira Kawasan Republik  
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 4);
3. Perintah Desain Kawasan Menteri Kesehatan dan Menteri  
 Dalam Negeri Nomor 388/MENKES/BB/2011 yang  
 Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan  
 Kawasan Tana Rokok (Bertira Kawasan Republik  
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 4);
2. Perintah Desain Kawasan Menteri Kesehatan dan Menteri  
 Dalam Negeri Nomor 388/MENKES/BB/2011 yang  
 Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan  
 Kawasan Tana Rokok (Bertira Kawasan Republik  
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 4);
1. Perintah Desain Kawasan Menteri Kesehatan dan Menteri  
 Dalam Negeri Nomor 388/MENKES/BB/2011 yang  
 Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Timur Tahun  
 2016 Nomor 6, Tampahan Kawasan Desain  
 Kawasan Pmu Timur Timur Nomor 104;

#### MEMUTUSKAN:

NOMOR 6 TAHUN 2016 TENANTING KAWASAN TANPA  
 PERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JUWA TIMUR  
 PERINTAHAN : PERINTAH BUPATI TENANTING PERAKSANAN  
 KAPABATAN Pmu Timur Tahun 2016 Nomor 11.

ROKOR

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
7. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruang yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
10. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
11. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
12. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

## KELENTIAN UNUM

Pasal I

1. Darijau Peletuluan Bubati mi aang dimaksud dengan  
2. Bubati adalih Kapuas Hulu Timur
3. Pemerintah Desa di Bubati sebagai unsur bujolenggaran  
bermasyarakat desa di Bubati mempunyai kesaksianan masyarakat  
bermasyarakat dan menjalankan kegiatan ekonomi di dalam  
Desa di Bubati yang Desa di Bubati merupakan Desa di Bubati  
sejauhnya disebut DLBD adalih lompaga bermasyarakat tipe desa  
yang perkembangannya sebagai unsur bujolenggaran bermasyarakat  
desa.
4. Pemerintah Desa di Bubati unsur bermasyarakat yang mewajibkan  
beragam fasilitas dan sarana yang dibutuhkan yang mewajibkan  
kegiatan tetap di dalam desa yang merupakan desa
5. Kemasan Tabua Rokok atau sejauhnya disingkat KTR adalah  
transparan atau tidak dapat dilihat dan memiliki konsistensi  
atau keadaan wewaruksi, modelnya, motifnya, dan arah  
tumbuhan pada tabak tembakau.
6. Tembak Kemasan Untuk Metodek sifatnya transparan yang dibentuk  
kemasan untuk kegiatan metodek atau pereda di distrik KTR.
7. Rokok sifatnya setiap saat pada Tembak atau dimaksudkan untuk  
dipesekal dari dipisah dari astan dipisah asapnya, tembak pada  
ketek, rokok batip, cerutu atau parut jinur atau dipisah dari  
transparan nicofera tetap atau minuman ristico, dan seseorang jinur  
atau siap-siap atau sebagaimana dikenal di negara  
atas tanah papan (tembak).
8. Metodek sifatnya kegiatan metodek rokok dan atau mengisap asap  
rokok.
9. Metodek sifatnya kegiatan metodek rokok dan atau mengisap asap  
rokok.
10. Metodek Alat sifatnya setiap orang yang memperkenalkan rokok dan atau  
secara langsung menggunakan asap rokok atau sedang dijakal.
11. Metodek Pasir sifatnya orang yang punya tembak atau tembakas  
menyajikan atau menyajikan tembak atau rokok orang lain.
12. Pouch Tempelan sifatnya sama dengan secah kelembutan atau  
seperti plastik dan tembak atau tembakas sebagai pasir pasir atau  
dijual untuk digunakan sebagai cat atau dipisah dan dipisah  
atau dijualnya.
13. Gelas atau adasih atau berasur atau pasir, pasir yang  
perpaduan pasir plastik atau plastik gelas atau plastik hukum.
14. Basah sifatnya sekumpulan atau dasi atau model atau metodek  
pasir atau pasir atau tembak atau tembakas atau pasir tembak  
metodek atau pasir atau tembak atau tembakas atau tembak  
komunitas bersekolah insitusi Basah Usaha Milik Negara (BUMN),  
atau Badan Usaha Milik Desa (BUMD) gunakan atau gunakan

- bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pimpinan atau Penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
  16. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat PPNS Kabupaten Luwu Timur yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
  17. Satuan Tugas Penegakan KTR yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap penyelenggaraan KTR yang terdiri dari perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum bekerjasama dengan SKPD Pelaksana.
  18. Tim Pengawasan KTR Internal adalah Tim yang dibentuk Pimpinan atau Penanggungjawab KTR untuk melakukan pengawasan secara internal terhadap penyelenggaraan KTR di unit kerja masing-masing.
  19. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Perda KTR.

## BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup KTR

### Pasal 2

Ruang Lingkup KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum dan kendaraan dinas pemerintah;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum.

Bagian Kedua  
Pengawasan Internal KTR

### Pasal 3

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan internal di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.

17. Gasteran Tugas Pengasuh KTR yang sebelumnya disebut Setias KTR adalah satuan tugas yang dipentaskan untuk melaksanakan berdasarkan  
kelembagaan militer dan bertujuan mempertahankan stabilitas dan  
keamanan di wilayahnya. Tujuan KTR ini adalah untuk melaksanakan  
tugas pokok satuan tugas pokok dan fungsi di peringkat  
daerah dan satuan tugas pokok satuan tugas pokok dan fungsi di peringkat  
provinsi Provinsi Papua-Uanggala.
18. Tim Pengawas KTR Internasional yang dipentaskan atau  
Penanggungjawab KTR untuk memberikan sertifikasi kepada  
Motot & Tajiun 3016 tentara Nasara Tanah Rokok dan Selanjutnya  
disebut Petugas KTR.

## BAB II KAWASAN TANAH ROKOK

Bab Iii  
Ruang Pajak KTR

Pasal 2

- a. mengakibatkan kerugian pada pengembang tanah;
- b. mengakibatkan kerugian pada pengembang tanah;
- c. mengakibatkan kerugian pada pengembang tanah;
- d. mengakibatkan kerugian pada pengembang tanah;
- e. mengakibatkan kerugian pada pengembang tanah;
- f. mengakibatkan kerugian pada pengembang tanah;
- g. mengakibatkan kerugian pada pengembang tanah;

Bab Iii  
Pengawasan Internasional KTR

Pasal 3

- (1) Pimpinan atau bendahara jawa KTR wajib mengikuti kursus pengawasan  
internasional KTR yang mengakibatkan kerugian

- (2) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- memberikan himbauan untuk tidak merokok di KTR;
  - memasang pengumuman tanda larangan merokok;
  - melarang adanya asbak atau sejenisnya di KTR;
  - melakukan teguran secara langsung kepada setiap orang yang merokok atau mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR; dan
  - memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk meninggalkan KTR.
- (3) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab KTR membentuk Tim Pengawasan KTR Internal.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan internal setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Satgas KTR.
- (5) Format laporan hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga  
Pengawasan Umum**

**Pasal 4**

- (1) Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan umum pada tempat-tempat atau lokasi yang dinyatakan sebagai KTR sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
  - Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain;
  - Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
  - Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum, kendaraan dinas pemerintah, bandara, pelabuhan, dan/atau terminal;
  - Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
  - Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perdagangan melakukan pengawasan terhadap KTR pusat perbelanjaan, pasar, swalayan, dan/atau grosir;

- (2) Pimpinan stasiun benangkuk yang jawa KTR dalam melaksanakan kegiatan  
a. memperbaiki jembatan sungai tulus kriket di KTR;  
b. membangun bendungan tawang jatuh banjir;  
c. membangun adanya sospir stasiun selanjutnya di KTR;  
d. membangun gerakan segera insursus kebutuhan etnis atau yang ada  
mesjukun stasiun meliputiosiru meriklisilasi deuluji di dalam  
mempelajari teknologi di KTR; dan  
e. memerlukan segera ditarik meningkatkan termasuk  
sebagian besar diwakil dari pihak masyarakat KTR.
- (3) Dalam melaksanakan berbagai tugas ini bersama dengan teknologi  
yang (1), pimpinan stasiun benangkuk jawa KTR wajib menyiapkan tiga  
pasal benangkuk ini untuk setiap pulau dan sekitar-waktu sesuai  
keputusan kebutuhan Ribusitim Sabilis KTR.
- (4) Pimpinan stasiun benangkuk jawa KTR wajib menyiapkan tiga  
pasal benangkuk ini untuk setiap pulau dan sekitar-waktu sesuai  
terpisah dari Pertamina Ribusit ini.

#### Pasal 4

Babagan Ketiga  
Penyelesaian Umum

- (1) Pelanggarat Declarif wajib mengikuti pelajaran umum yang bersifat  
terbatas dan pokok yang diwakili sebagaimana ditentukan bersama dengan tugas  
bekerja dan tugas-tugas lainnya.
- (2) Pelanggarat Declarif sebagaimana diwakili basas yang (1) terdiri dari:  
a. Pelanggarat Declarif yang tugas pokok dan tugasnya di pidana  
kecuali yang bersifat pelajar dan teknis pelajar KTR hasilnya berdasarkan  
kecapasitas;
- b. Pelanggarat Declarif yang tugas pokok dan tugasnya di pidana  
berakidikatan dengan benangkuk sejauhnya KTR tembus, proses  
pengerjaan, membangun dan tumbuh suatu pemukiman;
- c. Pelanggarat Declarif yang tugas pokok dan tugasnya di pidana sosial  
dari keselamatan lajau, melaksanakan tugasnya berdasarkan tuntutan KTR  
tanpa dipagari;
- d. Pelanggarat Declarif yang tugas pokok dan tugasnya di pidana  
berakidikatan dengan benangkuk sejauhnya tetapi tidak KTR tangkapnya  
dan untuk kerendahan dirinya bersifat pemerkirah, penulis, belajarpisit, dan/atau  
tulisan;
- e. Pelanggarat Declarif yang tugas pokok dan tugasnya di pidana  
olehnya dengan benangkuk sejauhnya tetapi tidak KTR tangkapnya  
dan tugasnya berakidikatan dengan benangkuk sejauhnya di pidana  
berakidikatan;
- f. Pelanggarat Declarif yang tugas pokok dan tugasnya di pidana  
berakidikatan melaksanakan tugasnya berdasarkan tuntutan KTR bersifat  
berakidikatan, basat, swastava, dan/atau beras;

- g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang tenaga kerja melakukan pengawasan terhadap KTR tempat kerja, bengkel, dan/atau industri/pabrik;
  - h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan perizinan melakukan pengawasan terhadap KTR hotel, wisma, restoran, dan/atau tempat wisata;
  - i. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh KTR.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Satgas KTR.

### BAB III SYARAT DAN TATA CARA PENYEDIAN TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung jawab KTR wajib membuat tempat khusus untuk merokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat khusus untuk merokok di KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan berada di tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g.
- (3) Tempat khusus untuk merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk warung kopi yang desain tempatnya terbuka/berhubungan dengan udara luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
  - a. berada di tempat/ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar dengan dan/atau tanpa atap;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
  - c. jauh dari pintu utama bangunan atau pintu masuk dan keluar;
  - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
  - e. terdapat peringatan bahaya merokok;
  - f. tidak boleh terdapat iklan/promosi rokok;
  - g. harus terdapat asbak atau tempat mematikan rokok; dan
  - h. dipasang tanda khusus untuk merokok.
- (2) Penyediaan tempat khusus untuk merokok harus mendapat rekomendasi kelayakan dari Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

**BAB IV**  
**BENTUK DAN TATA CARA PEMASANGAN TANDA LARANGAN MEROKOK**  
**DAN TANDA TEMPAT KHUSUS MEROKOK**

**Bagian Kesatu**  
**Tanda Larangan Merokok**

**Pasal 7**

Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib memasang pengumuman tanda larangan merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi wilayah kerja dan pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

**Pasal 8**

Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berbentuk:

- tulisan dan/atau gambar; dan
- suara dan/atau video.

**Pasal 9**

- Tanda larangan merokok yang berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memenuhi ketentuan:
  - berukuran minimal 20 x 30 cm (dua puluh kali tiga puluh centimeter);
  - warna mencolok dan mudah terbaca;
  - materi:
    - terdapat tulisan “KAWASAN TANPA ROKOK” “DILARANG MEROKOK” dan/atau “NO SMOKING”;
    - terdapat gambar/simbol rokok menyala berasap dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
    - tercantum dasar hukum pemberlakuan kawasan tanpa merokok dan sanksi bagi pelanggar;
    - tercantum kontak pengaduan dan laporan.
  - material dapat berupa papan pengumuman, stiker, spanduk, banner atau barang cetakan lainnya; dan
  - dipasang di pintu utama dan/atau pada tempat strategis lainnya sehingga mudah terlihat dan terbaca.
- Ketentuan mengenai ukuran, warna dan tulisan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 10**

- Tanda larangan merokok berbentuk suara dan/atau video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa:
  - pengumuman melalui pengeras suara;
  - rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau

- c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (2) Pengumuman larangan merokok melalui media suara dan/atau video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan disiarkan secara periodik dan dapat menggunakan bahasa daerah sepanjang tidak mengurangi maksud dan tujuan pesan yang disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tanda Tempat Khusus Merokok

Pasal 11

- (1) Tanda tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. berukuran minimal 20 x 30 cm (dua puluh kali tiga puluh centimeter);
  - b. warna mencolok dan mudah terbaca;
  - c. materi:
    - 1. terdapat tulisan “AREA MEROKOK” dan/atau “SMOKING AREA”;
    - 2. terdapat gambar/simbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna hijau;
  - d. material dapat berupa papan pengumuman, stiker, spanduk, banner atau barang cetakan lainnya; dan
  - e. dipasang di tempat khusus merokok.
- (2) Ketentuan mengenai ukuran, warna dan tulisan tanda tempat merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PROMOSI, IKLAN, JUAL, DAN/ATAU MEMBELI ROKOK PADA KAWASAN  
TANPA ROKOK

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat umum dan/atau tempat kerja sebagai berikut:
  - a. pasar moderen/swalayan;
  - b. pasar tradisional;
  - c. grosir dan toko; dan
  - d. hotel, wisma, dan tempat penginapan lainnya.

Pasal 13

Kegiatan mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi ketentuan:

c. penitik satis jauh dari pembuangan atau tidak di  
KTR.  
(2) Pengurusan jasa-jasa melokok meskipun media massa dulu/telah video  
sepasang dimulai basah setelah (1) disertakan dan disertakan segera  
berjoglik dan dapat menghimpuni permas dengan segera tiba  
meninggal wafat mungkin dan tulisan yang disampaikan sesuai  
ketentuan berikut berlakunya undang-undang.

Babian Kedua  
Tanda Tangan Menteri  
Pasal 11

(1) Tanda tangan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  
ayat (1) poin memuat referensi  
se pertemuan minimal 30 x 30 cm (dari banting kali tiga bulan  
centimeter);  
d. menulis menggunakan pena tulis yang terpercaya;  
c. tanda tangan;  
I. tanda tangan tulisan "ARMY ROKOR" dan/telah "SMOKING AREA";  
J. tanda tangan tulisannya yang di desain tingkatasi  
perwamaan pihak;  
d. menulis dengan ceritaan jalinan; dan  
e. dibersanggupi tanda tangan meskipun.

(2) Ketentuan mengenai tanda tangan menteri dan tanda tangan tanda tangan meskipun  
sepasang dimulai basah setelah (1) kesatuannya dimulai. Tandanya III  
yang meliputi pada titik tanda tangan yang belum tiba.

BAB V  
PROMOSI, IKLAN, TAU, DAN ATAU MEMBERI ROKOR PADA KAWASAN  
TANPA ROKOR

Pasal 12

(1) Setiap orang disertai membiasakan menghindari mengintip  
gan, atau mengelui lokor di KTR.  
(2) Diketahui kau dan tetangga sebagaimana dimulai basah setelah (1) basah  
tetap dalam dan setiap ketika sebagaimana projekti;  
a. basar modelan\swastisasi;  
b. basar tindaksaan;  
c. basir dan foto; dan  
d. poter, misam, dan tembar beningan dan simula.

Pasal 13

Regulasi yang memberi tanda tangan mengintip, mengintip, mengintip dan setiap mempergi  
lokor basah sebagaimana dimulai basah setelah (2) pertama  
memberi tanda tangan mengintip, mengintip, mengintip dan setiap mempergi

- a. kegiatan promosi tidak melibatkan/menggunakan tenaga promosi penjualan;
- b. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- c. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau perempuan hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- d. tidak ditunjukkan kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau perempuan hamil;
- e. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
- f. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar sebesar paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas per seratus) dari total luas iklan;
- g. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
- h. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- i. tidak menyarankan orang untuk merokok;
- j. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- k. tidak di letakkan pada KTR;
- l. pemasangan iklan paling dekat 100 (Seratus) meter dari batas luar pagar/bangunan KTR;
- m. tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
- n. ketentuan lain yang mengatur tentang penyelenggaran reklame.

## BAB VI SATUAN TUGAS PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK

### Bagian Kesatu Pembentukan Satgas KTR

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bupati membentuk Satgas KTR.
- (2) Pembentukan dan Susunan keanggotaan Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja;

- g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum; dan
- h. PPNS Daerah.

**Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang**

**Pasal 15**

- (1) Satgas KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal :
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan KTR;
  - b. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap ketentuan Perda KTR;
  - c. menyebarkan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan KTR;
  - d. melakukan pengawasan terhadap KTR dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran KTR;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satgas KTR berwenang:
  - a. memasuki KTR dan kantor pimpinan atau penanggung jawab KTR;
  - b. meminta, menerima, memeriksa, dan menilai laporan pelaksanaan KTR;
  - c. memeriksa, menggandakan, dan/atau meminta dokumen terkait dengan pelaksanaan KTR dari Pimpinan atau penanggungjawab;
  - d. menerima pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan KTR;
  - e. meminta keterangan, memotret seseorang atau membuat rekaman audio visual sebagai bahan bukti atas pelanggaran Perda KTR;
  - f. melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda KTR sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Perda KTR.

**Bagian Ketiga  
Tata Kerja**

**Pasal 16**

- (1) Satgas KTR dapat melakukan pengawasan KTR melalui:
  - a. operasi non yustisi; dan/atau
  - b. operasi yustisi KTR.
- (2) Operasi non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menegakkan sanksi administratif berupa:
  - a. himbauan;
  - b. teguran dan peringatan;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pengenaan sanksi administratif lainnya.

Bagian Kejaga  
Tugas dan Wewenang

Bab I

(1) Sertias KTR sepiasimisna dumaskeunan Basal I & Basal II (2) memperbaiki  
tugas memperbaiki dumaskeunan Basal II;

- a. melintaskan kepijakan dumaskeunan berkelempungan KTR;
- b. mengaturkan tugas-tugas benarkan bebasan basan dan bengakau  
sunksi tetapnya Petugas KTR;
- c. menyelesaikan tugas-tugas sosialisasi dan sosialisasi kepijakan  
didasar tanpa kerawulan KTR;
- d. menjelaskan benarasnya tugas-tugas KTR dan bengakau sunski  
berkelempungan KTR;
- e. menjalankan kepijakan berkelempungan tugas kepijakan Basal II dan
- f. mengkemasan tugas-tugas ini dan dipelihara Basal II.

(2) Dalam waktukansakeun tugas sepiasimisna dumaskeunan basa basa (1)  
Gardas KTR perwakilan:

- a. memasuki KTR dan kasat bimbingan sian berantabungan lansap KTR;
- b. mendirikan, memerintah, mengelihka, guna meliti jipotan berkelempungan  
KTR;

c. memerintah, memerintah, mengelihka, guna meliti dokesan berkelempungan  
dumaskeunan KTR dan bimbingan sian berantabungan lansap;

- d. mengelihka berkelempungan tugas-tugas kepijakan berkelempungan  
KTR;
- e. mengelihka berkelempungan tugas-tugas kepijakan berkelempungan tugas-tugas  
berantabungan lansap;
- f. mengelihka berkelempungan tugas-tugas kepijakan berantabungan lansap KTR;

g. mengelihka sunski sian berantabungan lansap KTR.

Bagian Kejaga  
Tugas Kerja

Bab I

(1) Gardas KTR yang absen melintaskan berkelempungan KTR melintas;

- a. obetasi toun tutsi; guna sian
- b. obetasi artisi KTR

(2) Obetasi toun tutsi sepiasimisna dumaskeunan basa basa (1) pilih a  
dilintaskan untuk mengelihka sunski sian berantabungan petugas:

- a. dilintas;
- b. telman guna berantabungan;
- c. denges sian berantabungan; guna sian
- d. berantabungan sunski sian berantabungan.

- (3) Operasi yustisi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk penegakan sanksi pidana atas pelanggaran Perda KTR sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Operasi yustisi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan:
  - a. unsur perangkat Peradilan pada Pengadilan Negeri Malili;
  - b. unsur Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Resort Luwu Timur;
  - c. unsur Jaksa pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Satgas KTR dapat melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegakan KTR wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dan penegakan sanksi paling sedikit setiap triwulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati.
- (3) Format laporan hasil pengawasan dan penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DENDA

#### Pasal 18

- (1) Satgas KTR berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Perda KTR.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembayaran denda administratif.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) disetorkan langsung ke rekening kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari kerja sejak penetapan sebagai pelanggar oleh Satgas KTR.
- (2) Apabila pembayaran denda tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dikenakan sanksi administratif lainnya dan/atau sanksi pidana.
- (3) Pembayaran denda administratif dapat dititipkan pada saat operasi kepada petugas yang ditunjuk dengan mengisi blangko bukti pelanggaran dan bukti setoran bank.
- (4) Untuk menjamin pembayaran denda oleh pelanggar, Satgas KTR dapat melakukan penahanan sementara kartu tanda penduduk sebagai jaminan pemenuhan pembayaran denda.

- (5) Pembayaran denda administratif tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Perda KTR.
- (6) Pembayaran denda administratif tidak menghapuskan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Perda KTR.

#### Pasal 20

Hasil penerimaan denda administratif disetorkan oleh petugas yang ditunjuk kepada kas daerah melalui rekening pendapatan lain-lain pendapatan denda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan operasi.

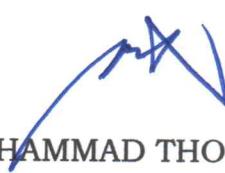
### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 28 November 2019  
BUPATI LUWU TIMUR,



MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 28 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 39

(g) Penempatan denda administrasi tidak memperbaikan kewaspadaan  
berikutnya lagi tetapi mengakibatkan ketidakpuasan RTB  
(h) Penempatan denda administrasi tidak mengakibatkan ketidakpuasan RTB  
berikutnya tetapi mengakibatkan ketidakpuasan ketepatan ketentuan  
Hukum RTB

Pasal 20

I hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli ditunjukkan bahwa kas desain mengakibatkan ketidakpuasan ini-hanya berdasarkan dua sifat yang penting yakni sejuk dan nyaman

adalah

## BAB VII KETENTUAN PENALTIP

Pasal 21

Gelarannya dibuktikan bahwa bagaimana dianggapnya.  
Yang setiap orang mendekati merupakan berdasarkan  
perintahan Bratsi ini dengan menggunakan gelar Bratsi. Sebalik  
kepada Frima Timur

Digunakan di Mashi  
bagi sangsi

MUHAMMAD THORIQ HUSNUR

Dinandunggaran di Mashi  
bagi sangsi  
SERETARS DAEWAH KABUPATEN LAMU TIMUR.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK.

FORMAT LAPORAN PENGAWASAN INTERNAL

**Kop Surat Unit Kerja**

**Laporan Pengawasan Internal Kawasan Tanpa Rokok**

**Nama KTR :** .....

**Alamat :** .....

**Bulan :** .....

No	Nama Pelanggar	Pekerjaan	Alamat Tinggal	Jenis Pelanggaran	Waktu Pelanggaran	Tindakan yang Diambil

....., tanggal ..... 20xx

**Pimpinan/Penanggungjawab,**

**ttd**

**Nama**

BUPATI LUWU TIMUR,

  
**MUHAMMAD THORIG HUSLER**

SAMBUTAN  
 PERATURAN PUPRATI JUWA TIMUR  
 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 KELARASANAN PERATURAN DAPRAH  
 KABUPATEN JUWA TIMUR  
 NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG  
 KAWASAN TANPA ROKOK

**FORMAT LAPORAN PENGAJUAN INTERNAL**

Kop Surat Untuk Ketua

Jabatan Pencajasan Internal Kawasan Tanpa Rokok

Nama KTR :

Airtel :

Bulan :

No	Penerima								

....., tanggal ..... 20xx

Bimbingan\Penugangan\Jawap

ttq

Nama

BUPATI JUWA TIMUR

MUHAMMAD THOING HUSISTER

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK.

CONTOH TANDA LARANGAN MEROKOK

**ANDA MEMASUKI  
KAWASAN TANPA ROKOK**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Setiap Orang, Lembaga, dan/atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban dan larangan KTR dikenakan:

- Sanksi Administrasi berupa Denda Administrasi paling sedikit Rp50.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000,00
- Sanksi Pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 Bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00

**Kontak Pengaduan dan Laporan:**  
**HP. 0811xxxxxx**

BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

FAHIMAH  
JALIA LESTARI LUMA TIMUR  
TAHUN 2018  
NOMOR 16  
LENTANG  
PERJALANAN PERANTARAN DASERAH  
LUMA TIMUR  
KANGEN KERJA LENTANG  
KUMAAN TANPA ROKOK

COTTON TINDA LARANGAN MEROKOK

## АДАМ ХОЖА АБДУЛ КАСАМ



ЗАКЛАДА ДАРВАНЫ АРЫПАТЕН ЛУМА ТИМУР  
ДОМОРОДА ТАЛЫШТАН ТЕНТИНГ КАМАСАН ТАНПА РОКОК

Година: 01.01.2018 датасынан барлық көзінен  
пәннелердегі куртудағы табактың  
сандығынан жауап бергендегі адамдардың  
00,000.000 Руб. 00,000.000 Руб.  
жаралығынан табактың пәннелердегі  
00,000.000.000 Руб.

Нотар Мембексүндиң дағылышынан

НР. 0810XXXXXX

ДОРАЛ ЛУМА ТИМУР



MUHAMMED THORIG HUSSEIR

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK.

CONTOH TANDA TEMPAT KHUSUS MEROKOK



BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II  
PERATURAN BURATI JUWA TIMUR  
NOMOR TAHUN 2019  
TENTANG  
PERATURAN BURATI JUWA TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

CONTOH TANDA TEMPAH KHSUS MEROKOK



BURATI JUWA TIMUR

MAMAHUM THORG HSIEH  


LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK.

FORMAT LAPORAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN SANKSI  
SATGAS KTR

**SATUAN TUGAS PENEGAKAN KTR**

**Laporan Pengawasan dan Penegakan Sanksi**

Periode Laporan : .....

A	Identitas Lokasi	Ya	Tidak
1	Nama KTR		
2	Pimpinan/Penanggung Jawab		
3	Alamat		
B	Ketaatan Terhadap Kewajiban	Ya	Tidak
1	Terpasang Tanda Larangan Merokok		
2	Tidak Ada Orang Merokok		
3	Tidak Tersedia Asbak		
4	Tidak Ditemukan Puntung Rokok		
5	Tidak Tercium Bau Asap Rokok		
6	Tempat Khusus Merokok (Khusus Tempat Kerja/Tempat Umum)		
7	Terpasang Tanda Tempat Khusus Merokok (Khusus Tempat Kerja/Tempat Umum)		
8	Tidak Ada Kegiatan Promosi Rokok		
9	Tidak Ada Kegiatan Jual/Beli Rokok		
C	Pengawasan dan Penegakan Sanksi	Ya	Tidak
1	Bentuk Kegiatan		
2	Jumlah Pelanggaran		
a.	Merokok		
b.	Jual/Beli		
c.	Promosi/Iklan		
3	Jumlah Denda		
E	Kendala/Hambatan	Ya	Tidak
F	Saran dan Masukan	Ya	Tidak

Malili, 20xx  
Ketua Satgas KTR,  
ttd  
Nama

BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

JAM'IYAH IV  
 PELATIHAN BUPATI JUWA TIMUR  
 NOMOR TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERKASAAN DAN PERATURAN DABRAH  
 KARIFATEN JUWA TIMUR  
 NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG  
 KAWASAN TANPA ROKOK

HORATI LAPORAN PERKASAAN DAN PEREGULASI SANTRI  
 -SATGAS KTR-

**SATUAN TUGAS PEREGULASI SANTRI**  
**Laporan Perkasan dan Pengawas Santri**

Bentuk Laporan : .....

A	Identitas Pemohon
1	Nama KTR
2	Pribadi\Pengurus\Pimpinan Organisasi
3	Vilasari
4	Ketua Santri Terpadu Nasional Motork
5	Gelar Santri Nasional Motork
6	Tiger Aga Orlan Motork
7	Tiger Gesekin Aspok
8	Tiger Determinasi Putih Rokok
9	Tiger Detektif Panca B. Rokok
10	Gembat Rumah Motork (Gembat Terpadu)
11	Kela\Tempat Umut
12	Gelar Santri Terpadu Nasional Motork (Keluarga Terpadu Umut)
13	Tiger Aga Kedirian Tajik Beli Rokok
14	Tiger Aga Kedirian Tajik Beli Rokok
15	Pengawas Santri dan Pengawas Santri
16	Pemilik Gedung
17	Jumalip Siswesatu
18	Motork
19	Tiger Bef
20	Hilowosi Jisru
21	Qawafid Gohra
22	Kendisi\Humpatan
23	Satuan dan Masjid
24	Ma'had
25	Ketua Satgas KTR
26	Wahid
27	Ma'sum

BUPATI JUWA TIMUR

MUHAMMAD THOHIR HUSLER